

## Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

Wahyuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: [wahyunilbs1116@email.com](mailto:wahyunilbs1116@email.com)

**Abstract.** To find out how the employee payroll accounting system at the District Environmental Service is. Mandailing Christmas. using qualitative descriptive methods. Data collection techniques use observation, interviews and documentation studies. The results of the research show that: a) The sections or functions related to handling the payroll system include the personnel section, payroll maker section, finance section, cash sub-section, bookkeeping section, budget sub-section, and recording journal section. b) The documents used include: : Constant data (employee name attendance list, taxpayer identification number (NPWP), marital status and number of dependents, amount of non-taxable income, salary amount, division of work, BPJS contributions) and variable data (number of hours or days worked, number leave, leave, or illness, holidays, and cumulative income and tax deductions). c) The accounting records used are the accounting records used at the District Environmental Service. Mandailing for each OPD only uses manual recording which is then reported to BPKPAD to be entered into the payroll system. d) The network of procedures that form the payroll system, namely in its implementation the procedures for recording employee attendance and the documents used, as well as the procedures for paying salaries to employees are implemented into one series of activities.

**Keywords:** Accounting, District Environmental Service. Mandailing Natal, Employees, Payroll, Information Systems.

**Abstrak.** Untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penggajian pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal. menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Bagian atau fungsi yang terkait menangani dalam sistem penggajian diantaranya bagian personalia, bagian pembuat daftar gaji, bagian keuangan subbag kas, bagian pembukuan sub bag anggaran, dan bagian jurnal pencatatan. b) Dokumen-dokumen yang digunakan yaitu diantaranya : Data konstan (daftar hadir nama karyawan, nomor pokok wajib pajak (npwp), status pernikahan dan jumlah tanggungan, jumlah penghasilan tidak kena pajak, jumlah gaji, divisi tempat bekerja, iuran bpjs) dan data variabel (jumlah jam atau hari kerja, jumlah cuti, izin, atau sakit, hari libur, dan penghasilan dan potongan pajak kumulatif). c) Catatan akuntansi yang dipakai adalah catatan akuntansi yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing untuk setiap OPD hanya menggunakan pencatatan manual yang selanjutnya dilaporkan kepada BPKPAD untuk dimasukkan ke dalam sistem penggajian. d) Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian yaitu dalam pelaksanaannya prosedur untuk mencatat kehadiran pegawai dan dokumen-dokumen yang digunakan, serta prosedur pembayaran gaji sampai kepada pegawai dilaksanakan menjadi satu rangkaian kegiatan.

**Kata kunci:** Akuntansi, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal, Pegawai, Penggajian, Sistem Infotmasi.

### LATAR BELAKANG

Akuntansi dan manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Akuntansi sangatlah berguna bagi kehidupan manusia karena dengan adanya penerapan akuntansi bertujuan untuk mengendalikan keuangan sekaligus mampu melihat seberapa banyak uang yang diterima dan biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun instansi sekaligus memantau, mengendalikan, dan mengatur finansial. Definisi dari accountancy atau accounting itu sendiri sering diistilahkan sebagai bahasa bisnis yang sering disebut oleh pelaku bisnis dalam menerima penjelasan

mengenai keadaan instansinya dan juga pemberitahuan yang berkaitan dengan penghasilan instansi yang didapatkan selama satu periode ataupun selama periode berjalan.

Setiap Instansi atau Badan Usaha selalu membutuhkan faktor tenaga kerja manusia, dalam hal ini adalah pegawai. Pegawai merupakan orang pribadi yang di pekerjakan dalam Instansi (pemberi kerja) yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Peran serta seorang Pegawai dalam melaksanakan tugasnya sangat mendukung suatu pencapaian tujuan Instansi. Untuk pencapaian tujuan Instansi dibutuhkan adanya balas jasa atau pembayaran gaji yang sesuai bagi Pegawai yang dapat menjadi salah satu usaha untuk memacu kinerja Pegawai.

Pemberian gaji merupakan kegiatan rutin bagi Instansi sehingga merupakan pengeluaran Instansi yang relatif besar karena itu diperlukan suatu sistem penggajian yang baik agar dalam pelaksanaan penggajian dari perhitungan sampai pembayaran dapat berjalan dengan efisien dan lancar. Dengan cara tersebut maka akan memberi kemudahan dalam pengawasan pelaksanaan penggajian.

Biaya gaji merupakan biaya yang sangat penting dan menimbulkan resiko kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan dan penyelewengan yang menyebabkan besarnya kerugian pada instansi, untuk itu diperlukan peranan sistem akuntansi yang didesain dan diimplementasikan dengan baik agar menghasilkan informasi yang handal untuk Instansi. Sistem akuntansi ini terdiri dari perangkat kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat ini, tentu membawa dampak pada bidang ekonomi. Dimana sistem akuntansi yang sebelumnya dijalankan secara manual dirasakan tidak lagi mampu memberikan manfaat yang memadai dalam bidang operasional (Ulfa, 2019 : 78).

Oleh karena itu, banyak instansi yang mulai beralih kepada sistem akuntansi yang berbasis komputer. Pengolahan data akuntansi secara komputerisasi mampu memberikan informasi yang handal dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi Instansi. Salah satu bentuk penerapan sistem akuntansi dalam suatu Instansi adalah penggajian. Pada dasarnya, Instansi juga harus mempunyai sistem akuntansi penggajian yang terintegrasi dengan jelas dan terstruktur. Karena jika tidak, dampak yang dihasilkan akibat buruknya sistem informasi akuntansi penggajian bisa menyebabkan berkurangnya kepercayaan Pegawai terhadap Instansi. Lalu, imbas dari menurunnya kepercayaan Pegawai terhadap Instansi dapat menimbulkan turunnya efektivitas kinerja Pegawai dalam suatu Instansi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal merupakan Instansi milik pemerintah daerah yang bergerak di sektor jasa yang tugasnya menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup, terjaganya kualitas sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta juga yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal harus mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik bukan hal yang mudah, tapi harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan ditemukan bahwa, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal adalah suatu organisasi daerah yang bergerak di sektor jasa yang tugasnya menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup, terjaganya kualitas sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta juga yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun pada umumnya organisasi daerah memiliki kesamaan dalam menjalankan kegiatannya operasionalnya, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal ini memiliki prosedur tersendiri dalam memberikan gaji pada Pegawainya. Dengan jumlah pegawai yang relative banyak, sistem akuntansi yang digunakan didalam Instansi ini kurang begitu memadai. Selain itu, bagian yang terkait dalam penggajian belum berjalan baik dikarenakan kekurangan pembayaran gaji akibat keterlambatan penyampaian data konstan/variabel oleh pegawai, selanjutnya masalah (Rapel gaji belum terbayar karena pegawai yang biasa menyusun pembayaran rapel pindah dan digantikan pegawai yang lain (perangkapan tugas).

Selain dari fenomena yang telah dipaparkan di atas juga terdapat dari hasil tabulasi serta triangulasi masalah lain yang sering terjadi dalam akuntansi penggajian antara lain Penghitungan Gaji yang Tidak Akurat. Salah satu masalah yang paling umum dalam penggajian adalah kesalahan dalam penghitungan gaji. Ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan atau pelatihan, perangkat lunak penggajian yang kurang handal, atau kesalahan manusia. Pelanggaran Hukum dan Peraturan: Masalah lain yang sering terjadi adalah pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku. Ini dapat terjadi karena perusahaan tidak memahami dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku atau karena upaya untuk memangkas biaya dengan tidak membayar upah minimum, mengabaikan hak karyawan, atau tidak memberikan manfaat yang diperlukan. Keterlambatan Pembayaran Gaji: Keterlambatan dalam pembayaran gaji dapat mengakibatkan karyawan tidak puas, merusak reputasi perusahaan, dan dapat mengakibatkan biaya tambahan seperti denda dan bunga. Tidak Adanya Pelaporan yang Akurat: Pelaporan yang tidak akurat atau tidak tepat waktu dapat menghasilkan kesalahan dalam perhitungan pajak, sanksi atau denda dari pemerintah, dan membuat proses

audit lebih sulit. Kecurangan: Kecurangan dalam penggajian dapat terjadi melalui manipulasi data gaji, pembayaran gaji fiktif atau palsu, atau pembayaran gaji karyawan yang sudah tidak bekerja lagi. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan dan dapat memicu tindakan hukum.

Oleh karena itu, sistem penggajian yang tersusun rapi dan teratur sangat dibutuhkan agar lebih mudah bagi pimpinan dalam menetapkan gaji Pegawai. Dengan demikian, pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan. Selain itu, sistem penggajian yang baik juga dapat menyediakan data-data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penggajian Pegawai yang ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Analisis**

Analisis adalah proses pemecahan masalah dengan memeriksa masalah utama yang kemudian dianalisis dalam beberapa bagian untuk mengetahui sumber permasalahan yang sebenarnya terjadi. Sehingga diharapkan dengan melakukan analisis harga pokok produksi dapat membantu perusahaan kelapa sawit dalam menentukan harga pokok produksi, yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sehingga meminimalisir kerugian.

### **Sistem Akuntansi Penggajian**

Sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari bagian bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu (Ulfa, 2019 : 55). Akuntansi sering disebut dengan bahasa bisnis. Semakin baik Anda memahami bahasa tersebut, semakin baik pula Anda dapat mengelola aspek-aspek keuangan Instansi. Hal ini disebabkan banyaknya aspek-aspek keuangan di dalam hidup ini sehari-hari yang didasarkan pada akuntansi seperti perencanaan keuangan pribadi, biaya-biaya pendidikan, investasi, pinjaman, pelunasan mobil, pajak peng hasilan dan banyak aspek-aspek lain. Tujuan utama akuntansi adalah untuk men catat, melaporkan dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai pengambil keputusan (Wani & Safitri, 2019 : 37).

Pengertian akuntansi memiliki definisi yg berbeda beda, tergantung dari sudut pandang seseorang, akan tetapi pada dasarnya pengertian akuntansi yang berbeda beda tersebut selalu menekankan kegunaannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi adalah suatu proses yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi yang informasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan Instansi dalam

pengambilan keputusan strategis dan digunakan untuk keperluan lainnya seperti perhitungan pajak Instansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna untuk memudahkan pengelolaan Instansi (Tangdiialla, Kalangi, & Pinatik, 2021 : 5).

Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang di beri tugas-tugas administrative dan pimpinan yang jumlah biasanya tetap secara bulanan atau tahunan. Di samping itu pegawai mungkin memperoleh manfaat-manfaat yang diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, tunjangan hari raya, uang transport, uang makan dan lain-lain (Damayanti, 2017 : 45).

Banyak lembaga atau badan usaha yang menggunakan beberapa bentuk penggajian yang berbeda antara kelompok-kelompok pekerja. Ada yang dibayarkan berdasarkan hasil pekerjaan, ada yang dibayar berdasarkan waktu/jam (lamanya) mereka bekerja, ada yang di gaji mingguan atau bulanan. Dan ada juga yang menggunakan sistem hadiah bagi mereka yang bekerja keras (K Kamilah & Nst, 2019 : 19). Tujuan dasar dari sistem penggajian, yaitu sebagai imbalan, sebagai penghargaan dan sebagai pendorong.(Sriyadi, 2001).

Pada dasarnya sistem penggajian diberikan pada pegawai Instansi yang bersifat tetap. Jadi pegawai tersebut bekerja secara terus menerus dan melakukan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenang yang diberikan kepada mereka.

### **Sistem Akuntansi Penggajian dalam Perspektif Islam**

Terkait dengan penentuan upah kerja, dalam islam tidak memberikan ketentuan rinci baik ketentuan al qur'an maupun sunnah. Berikut sumber hukum pengupahan atau penggajian dalam perspektif islam. Sumber hukum pengupahan/penggajian kepada pegawai sesuai dengan perspektif islam telah diatur dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Artinya : *“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”* (Indonesia, 2019 : 187).

Ayat ini diturunkan dalam konteks Perjanjian Hudaibiyah, yaitu perjanjian damai antara umat Islam Madinah dan non-Muslim di Makkah. Perjanjian itu termasuk klausul yang memungkinkan siapa pun untuk bergabung dengan salah satu pihak tanpa konsekuensi apa pun.

Beberapa orang munafik yang tinggal di antara kaum Muslimin di Madinah ingin memanfaatkan ketentuan ini dan bergabung dengan orang Mekah.

Nabi Muhammad (saw) menyadari niat mereka, dan Allah menurunkan ayat ini kepadanya sebagai tanggapan. Ayat tersebut memberitahu Nabi untuk membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka, karena Allah melihat perbuatan mereka dan akan menilai mereka sesuai dengan itu. Ini juga mengingatkan mereka bahwa mereka pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan Allah akan memberi tahu mereka tentang apa yang dulu mereka lakukan.

Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya pertanggungjawaban dan bahwa Allah mengawasi perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Itu juga mengingatkan kita bahwa kita akan diadili menurut perbuatan kita dan bahwa kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari deskriptif kualitatif dan data pendukung seperti literatur dll. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang terdiri atas kata-kata atau yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Untuk memperoleh data secara objektif, terperinci, dan juga baik sesuai dengan kejadian dan permasalahan yang ada, maka metode atau teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan studi literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di di Kabupaten Mandailing Natal Lokasi penelitian yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal dari bulan September 2021 – April 2022. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa perangkat di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah 3 orang yaitu kepala Dinas Lingkungan Hidup yaitu bapak Kasmir SPd,MM, bendahara Dinas Lingkungan Hidup Mutiah,SE, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Lukman Hakim. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Sedangkan objek penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan sistem Akuntansi penggajian pegawai Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara kepada pihak internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal mengenai analisis sistem akuntansi penggajian pegawai dan data sekunder seperti absensi pegawai, rekap daftar gaji, bukti kas keluar serta data-data penting lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal.

### **Penggajian Pegawai**

Setiap badan usaha/Instansi selalu membutuhkan faktor tenaga kerja manusia, dalam hal ini adalah pegawai. Peran serta seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sangat mendukung suatu pencapaian tujuan Instansi. Pemberian gaji terhadap pegawai seharusnya mendapat perhatian yang lebih utama dari seorang Direksi atau Pimpinan.

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal merupakan suatu Instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal merupakan instansi yang cukup besar dimana persoalan tentang penggajian pegawai menjadi masalah yang lebih penting karena pegawai yang dibutuhkan cukup banyak, sehingga untuk menetapkan gaji maka seorang Direksi/Pimpinan harus mengetahui tentang produktivitas, jabatan/golongan, lama kerjanya dan prestasi yang dimiliki setiap pegawai. Dengan demikian, maka sistem penggajian pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal harus mendapat penanganan dan pengawasan yang khusus agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pembayaran gaji.

Sistem penggajian yang diterapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal adalah bulanan, tidak menggunakan sistem upah harian. Gaji hanya dibayarkan kepada pegawai yang benar-benar tercatat sebagai yang sah dalam daftar induk kepegawaian.

### **Unsur-Unsur yang Terkait dalam Sistem Penggajian Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal**

#### **1. Dokumen yang Digunakan**

Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal menggunakan data konstan yang terdiri dari :

- a) Daftar Hadir Nama karyawan.
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c) Status pernikahan dan jumlah tanggungan.
- d) Jumlah penghasilan tidak kena pajak.
- e) Jumlah gaji.
- f) Divisi tempat bekerja.
- g) Iuran BPJS

Serta yang kedua yaitu data variabel yang mencakup sebagai berikut:

- a) Jumlah jam atau hari kerja.
- b) Jumlah cuti, izin, atau sakit.
- c) Hari libur.
- d) Penghasilan dan potongan pajak kumulatif.

Dokumen yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing sudah hampir sesuai dengan teori akan tetapi masih ada juga sedikit belum sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## **2. Catatan Akuntansi yang Digunakan**

Catatan akuntansi yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing untuk setiap OPD hanya menggunakan pencatatan manual yang selanjutnya dilaporkan kepada BPKPAD untuk dimasukkan ke dalam sistem penggajian.

### **a. Fungsi/Bagian yang Terkait**

Fungsi yang terkait dalam penggajian pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal antara lain; Bagian Personalia, Bagian Pembuat Daftar Gaji, Bagian Keuangan Sub Bagian Kas, Bagian Pembukuan Sub Bagian Anggaran, dan Bagian Jurnal Pencatatan. Sedangkan bagian yang terkait menurut teori antara lain : Bagian Kepegawaian, Bagian Pencatat Waktu Hadir, Bagian Pembuat Daftar Gaji, Bagian Akuntansi dan Bagian Keuangan. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal Pencatat waktu tidak terpisah menjadi bagian tersendiri karena catatan kehadiran pegawai ditangani langsung oleh bagian personalia. Hal ini disebabkan karena besarnya gaji pegawai tidak ditentukan oleh jumlah jam hadir. Tetapi ketidakhadiran pegawai juga mempunyai pengaruh terhadap besarnya gaji yang akan diterima oleh setiap pegawai.

### **b. Jaringan/Prosedur yang Membentuk Penggajian**

Prosedur yang membentuk sistem penggajian pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal yaitu menyusun dan mengumpulkan data-data konstan dan data variabel pegawai kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal, yang kemudian data-data atau dokumen tersebut akan diserahkan kepada BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), lalu kemudian setelah SP2D terbit, gaji pegawai akan di transfer ke Bank Sumut Cabang Payabungan yang kemudian akan ditransfer ke rekening masing-masing pegawai.



Sistem penggajian pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal hasilnya sudah cukup baik dan dapat dipakai sebagai sistem penggajian instansi karena tidak melibatkan banyak fungsi yang terkait. Suatu sistem penggajian yang baik melibatkan berbagai bagian antara bagian yang satu dengan yang lain harus terpisah. Bagian yang terkait dalam sistem penggajian pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal sudah sesuai dengan teori, artinya tidak ada perangkapan fungsi dan wewenang antar bagian, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan oleh instansi.

Untuk lebih jelasnya akan dibandingkan pada tabel di bawah ini yaitu tentang perbandingan menurut teori dengan sistem yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal , yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1. Perbandingan Teori dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Madina**

No	Menurut Teori	Menurut DLH Kab. Madina	Sudah Sesuai	Belum Sesuai
1	Unsur- unsur penggajian : 1) Gaji pokok 2) Tunjangan istri sebesar 10 % dari gaji pokok 3) Tunjangan anak sebesar 5 % untuk masing-masing anak, maksimal 2 anak. 4) Tunjangan pangan per orang 10 kg beras per pegawai dan tertanggung 5) Tujangan jabatan	Unsur- unsur penggajian : 1) Gaji pokok 2) Tunjangan istri sebesar 10 % dari gaji pokok 3) Tunjangan anak sebesar 5 % untuk masing-masing anak, maksimal 2 anak. 4) Tunjangan pangan per orang 10 kg beras per pegawai dan tertanggung. 5) Tujangan jabatan	√	
2	Dokumen yang terkait : 1) Daftar Hadir Nama Pegawai. 2) Surat Perubahan Gaji 3) Daftar Gaji Pegawai 4) Kartu Gaji 5) Voucher Pengeluaran	Dokumen yang terkait : Data konstan : 1) Daftar Hadir Nama karyawan. 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3) Status pernikahan dan		√

	<p>Kas/Voucher Kas Besar (VKB)</p> <p>6) Amplop Gaji</p> <p>7) Rekapitulasi Cuti</p> <p>8) Dokumen Pendukung Perubahan Gaji</p> <p>9) Rekap Daftar Gaji (Prisna &amp; Kusmilawaty, 2022)</p>	<p>jumlah tanggungan.</p> <p>4) Jumlah penghasilan tidak kena pajak.</p> <p>5) Jumlah gaji.</p> <p>6) Divisi tempat bekerja.</p> <p>7) Iuran BPJS</p> <p>Data variabel :</p> <p>1) Jumlah jam atau hari kerja</p> <p>2) Jumlah cuti, izin, atau sakit.</p> <p>3) Hari libur.</p> <p>4) Penghasilan dan potongan pajak kumulatif</p>		
3	<p>Catatan akuntansi yang digunakan : jurnal, buku besar, dan kartu gaji.</p>	<p>Catatan akuntansi yang digunakan : Catatan akuntansi yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing untuk setiap OPD hanya menggunakan pencatatan manual yang selanjutnya dilaporkan kepada BPKPAD untuk dimasukkan ke dalam sistem penggajian. Dalam hal buku besar, instansi hanya memakai buku besar manual yang bersifat umum dan tidak menggunakan buku besar pembantu lainnya.</p>		√
4	<p>Prosedur penggajian : Prosedur dengan bagan alir <i>flow chart</i> yang lengkap (Prisna &amp; Kusmilawaty, 2022).</p>	<p>Prosedur penggajian : Hanya singkat saja terdiri dari menyusun dan mengumpulkan data-data konstan dan data variabel pegawai kepada</p>	√	

		<p>Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal, yang kemudia data-data atau dokumen tersebut akan diserahkan kepada BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), lalu kemudian setelah SP2D terbit, gaji pegawai akan di transfer ke Bank Sumut Cabang Payabungan yang kemudian akan ditransfer ke rekening masing-masing pegawai. Akan tetapi beberapa fungsinya juga sudah sesuai dengan teori.</p>		
--	--	---	--	--

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal diperoleh kesimpulan yaitu Gaji yang diterapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal adalah menggunakan sistem bulanan tidak ada upah harian. Gaji yang biasanya dibayarkan pada pegawai secara tetap per bulan. Unsur-unsur yang terkait dalam sistem penggajian menunjukkan sudah sesuai dengan teori. Pada Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal dalam hal ini menunjukkan belum sesuai dengan teori. Catatan akuntansi yang dipakai dalam sistem Penggajian pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal dalam hal ini menunjukkan belum sesuai dengan teori. Serta jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal menunjukkan sudah sesuai dengan teori.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi penggajian pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mandailing Natal adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu perlu adanya pengawasan secara rutin dari Instansi pada pencatatan daftar hadir pegawai agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan pada daftar presensi pegawai. Dan perlu adanya pemisahan antara fungsi pembuatan daftar gaji dengan fungsi penerimaan pegawai, dan juga fungsi pencatat waktu hadir. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyelewengan dalam sistem penggajian. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa dilakukan tidak hanya terbatas pada sistem akuntansi penggajian saja, namun bisa diperluas atau di kembangkan bagi penelitian yang sama dengan perspektif yang berbeda.

---

## DAFTAR REFERENSI

- Akmal Tarigan, A., Yafiz, M., Harahap, I., Marliyah, Batubara, C., Ridwan, M., ... Nurhani. (2015). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan: Febi Press Uinsu.
- Armelia, A., Mariati, M., & Daryanti, D. (2020). Sistem Akuntansi Penggajian Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar. *Accounting Journal*, 1(2), 213–221.
- Bi Rahmani, N. A. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Press Uinsu.
- Damayanti, D. I. (2017). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Atas Siklus Penggajian Pada Perusahaan Outsourcing Untuk Menghindari Adanya Kecurangan Pada Pt. Human In Partner Surabaya. *E-Journal Akuntansi" Equity"*, 3(3).
- Dwijantara, I. M. M., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Karyawan Pada Pramudi Angkutan Siswa Gratis Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Perusahaan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 94–116.
- Faishol, A. (2017). Analisis Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada Cv. Gunung Dono Putra. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (Jpensi)*, 2(1), 14-Halaman.
- Fibriyanti, Y. V. (2017). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt. Populer Sarana Medika, Surabaya). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (Jpensi)*, 2(1), 14-Halaman.
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 106–123.
- Hadiyat, Y. R. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kinerja Manajerial. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(1), 37–42.
- Harmain, H., Nurlaila, Safrida, L., Sufitrayati, Alfurkaniati, Ermawati, Y., ... Nurwani. (2019). *Pengantar Akuntansi 1*. Medan: Madenatera.
- Hirmawan, A. C., Np, M. G. W. E., & Azizah, D. F. (2016). Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Karyawan Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Pt. Wonojati Wijoyo Kediri). *Brawijaya University*.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Bil Hadis*. Bandung: Cordoba.
- Kamilah. (2014). *Akuntansi Biaya*. Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara.
- Kamilah, K., & Nst, A. I. L. (2019). Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan Dan Distribusi Pendapatan Di Kota Medan. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(6).
- Kamilah, Kamilah, Syarbaini, A. M. B., & Yafiz, M. (2022). *Jula-Jula: Economic And Accounting Practices In The Muslim Community Of North Sumatra*. Share: *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 251–275.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (1st Ed.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

- Langi, B., Saerang, D. P. E., & Gerungai, N. Y. T. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam Upaya Pengendalian Internal Pada Pt. Gemilang Emas Indonesia. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Pontoh, Y. (2016). Analisis Sistem Akuntansi Gaji Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. *Politeknik Negeri Manado*.
- Pratama, H. I., & Sulistyowati, N. W. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pdam Kabupaten Nganjuk. *Tangible Journal*, 5(2), 53–64.
- Prayogo, Y., & Zulpa, Z. (2017). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Pegawai Harian Lepas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. *Innovatio: Journal For Religious Innovation Studies*, 17(1), 27–34.
- Prisna, N. D., & Kusmilawaty, K. (2022). Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 12–17.
- Putra, A. (2015). Analisis Sistem Dan Pengendalian Intern Pembayaran Gaji Dan Upah Karyawan Pada Pt. Bara Dinamika Muda Sukses Di Malinau. *Jurnal, Universitas Mulawarman*. Issn, 2355–5408.
- Rares, C., Kesuma, A. I., & Syakura, M. A. (2021). Analisis Sistem Akuntansi Gaji Dan Upah Karyawan Pada Pt Selyca Mulia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (Jiam)*, 5(3).
- Sriyadi. (2001). *Bisnis Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*. Semarang.
- Suffi, & Fitri. (2020). *Akuntansi Perusahaan Jasa*. Surabaya: Qiara Media.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tangdialla, A. R., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2021). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Manado. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 34–48.
- Trigo, A., Belfo, F., & Estébanez, R. P. (2016). Accounting Information Systems: Evolving Towards A Business Process Oriented Accounting. *Procedia Computer Science*, 100, 987–994.
- Ulfa, R. L. (2019). *Praktik Manajemen Keuangan Pada Umkm Konfeksi Di Kota Bandung Umkm*. Manajemen Keuangan.
- Wani, N., & Safitri, A. (2019). Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Sentra Dodol Di Kec. Tanjung Pura). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 37–52.
- Yurmaini, Y., & Ashari, K. (2019). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Al-Washliyah Medan. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 414–435.